

BERITA FOTO FRAKSI PKS DPR RI



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAYAT
REPUBLIK INDONESIA**





Terima Aspirasi Institusi Pendidikan Sumsel

Jakarta (30/03) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendukung terjadinya perubahan institusi dari STKIP PGRI Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menjadi Universitas.

Perwaker STKIP PGRI mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh persetujuan untuk mengubah status dan merger dari institusi menjadi universitas, khususnya pada empat program

studi meliputi ilmu komputer, pertanian, kewirausahaan, serta desain komunikasi visual (DKV). Sejak pertama diusulkan dari tahun 2019 lalu, usul perubahan tersebut sudah mendapat empat kali revisi.

Menanggapi aduan tersebut, Abdul Fikri Faqih menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

"Ini adalah hal yang bagus, melihat sudah ada 3.500 mahasiswa

sehingga pantas untuk diperhatikan. Karena semua proses online, diikuti saja. Semoga di hasil kelima, kita sudah masuk. Nanti akan kita komunikasikan dengan Dirjen Pendidikan. Kita akan minta demi membela, mengadvokasi, dan memangku kepentingan Pendidikan." Ujar Abdul Fikri Faqih dalam Hari Aspirasi yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (30/03).

KH. Buchori, Lc., M.A.



Kunker ke Kabupaten Tangerang



Tangerang (02/04) --- Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya, rombongan diterima langsung oleh Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, serta pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang bertempat di kantor Bupati Tangerang, Kamis (01/04/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati Tangerang terhadap pesantren melalui program pemerintah daerah bertajuk Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren).

Bukhori berharap, program Sanitren bisa ditiru oleh wilayah lain dan menjadi prototype program nasional.

"Sebelumnya, saya mengapresiasi perhatian Pak Bupati terhadap pesantren karena dilakukan secara natural, dan tidak terkesan dibuat-buat. Pasalnya, undang-undang tentang pesantren sejatinya baru disahkan pada tahun 2019, akan tetapi program Bupati untuk pesantren sudah disusun sejak tahun 2013," ungkap Bukhori

Untuk diketahui, program Sanitren adalah kebijakan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang sanitasi dan air bersih dengan cara

membangun fasilitas sanitasi yang memadai seperti kamar mandi, toilet, tempat mencuci santri, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi lain di lingkungan pesantren.

Selain itu, Anggota Baleg ini juga mendorong ada upaya lain dari Bupati Tangerang untuk menghadirkan lingkungan pondok pesantren yang sehat, disamping melalui program Sanitren.

Lebih lanjut, Bukhori mengusulkan supaya gerakan sanitasi untuk pesantren ini turut ditunjang oleh fungsi penyiadaran berdasarkan penjelasan saintifik dan proporsional kepada santri maupun warga di pesantren.



Serahkan Sembako pada Korban Banjir di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan (04/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbang Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

Bantuan sembako tersebut diserahkan secara simbolis kepada warga di Nagari Kampung Tengah Tapan dan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

"Bantuan sembako ini merupakan rangkaian dari aktivitas kepedulian Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat yang terkena musibah. Sekalipun banjir sudah

mulai surut, tetap ada bantuan," papar Hermanto.

Kepada para penerima sembako, Hermanto berharap agar bantuan yang diterima bermanfaat dan barokah.

"Bantuan ini wujud kepedulian PKS kepada masyarakat. Dalam suasana menjelang Bulan Ramadhan ini semoga baik yang memberi maupun yang menerima bantuan diberkahi," ucap legislator dari FPKS.

Belum lama ini akibat hujan deras, Sungai Batang Tapan meluap merendam areal persawahan yang ada disekitarnya dan air juga masuk ke rumah-rumah warga setinggi 1-1,5 meter merendam perabotan

rumah tangga yang ada didalamnya.

"Saat banjir melanda, relawan PKS Peduli telah dengan sigap membantu warga dengan sembako," ungkap Hermanto.

"Bantuan kali ini merupakan kelanjutan dari bantuan tersebut," pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan di Pesisir Selatan tersebut, Hermanto didampingi 2 pengurus DPD PKS Pesisir Selatan Doni Erisyah Putra dan Cendra Hardi Nurba serta Ketua DPC PKS Basa Ampek Balai Tapan Edison.

KH. Buchori, Lc., M.A.



Kunker Komisi VIII DPR ke Kabupaten Karawang



Karawang (24/03) --- Komisi VIII DPR RI bersama BNPB melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang. Dalam kunjungannya, rombongan diterima langsung oleh Bupati Karawang, Cella Nurrachdiana, pejabat BPBD, Dinas Sosial, serta jajaran lainnya di Kantor Bupati Karawang, Rabu (24/03).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyambut baik kesempatan serap aspirasi ini.

Bukhori mengatakan Komisi VIII DPR RI berkepentingan untuk menyerap gagasan dan usulan konstruktif dari sejumlah stakeholders, termasuk pemerintah

daerah, demi penyempurnaan substansi dari undang-undang penanggulangan bencana yang rencananya akan direvisi pada tahun ini sebagaimana telah termaktub dalam agenda prolegnas prioritas tahun 2021.

H. Johan Rosihan, S.T



**Hadiri Dialog
Kebangsaan
di Kupang**

Kupang (21/03) --- Anggota Komisi IV Fraksi PKS, Johan Rosihan melakukan dialog kebangsaan di Kupang bersama ormas dan OKP me NTT (21 Maret 2021)



H. Johan Rosihan, S.T



Membukan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani

Sumbawa (26/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, kembali membukan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani angkatan II dan III (26/03) di Grand Hotel Sumbawa Besar.

Dalam sambutannya, politisi yang dikenal cukup konsen pada isu-isu pertanian dan ketahanan pangan itu mengajak para peserta yang hadir untuk serius mengikuti pelatihan hingga selesai.

"Petani mesti punya kapasitas. Kalau sudah demikian, nanti isi tas akan menyusul. Ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya Bimtek angkatan pertama juga kita gelar di tempat ini. Saya harap peserta serius mengikuti paparan dari para

pemateri hingga selesai," kata Johan.

Petani dan penyuluh, lanjutnya, merupakan pilar penting yang perlu mendapat prioritas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian supaya menjadi lokomotif, penggerak dan pelopor yang kreatif, inovatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global.

Jika petani dan penyuluh punya kapasitas mumpuni, maka mudah bagi kita untuk melakukan akselerasi-akselerasi dalam dunia pertanian.

"Bimtek ini merupakan langkah awal. Kedepan, apa yang kita dapatkan di ruangan ini harus bisa diimplementasikan" tambah politisi



PKS itu.

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi IV DPR RI dan Balai Ketindan itu turut juga dihadiri oleh Kepala Balai Ketindan, Ir. Sumardi Noor, juga Kadis Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin.

H. Alifudin, S.E.,M.M



Kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR ke Pontianak, Kalimantan Barat



Pontianak (27/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat, (26/03/2021),

Rombongan diterima dan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, beserta jajaran di kantor gubernur Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan kali ini turut pula hadir beberapa mitra komisi IX seperti BP2MI, dewasa dan direksi BPJS Ketenagakerjaan, Dinas ketenagakerjaan daerah serta pusat.

Gubernur menyampaikan permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap terjadi. Baru-baru ini sebanyak 1771 PMI

tersandung masalah, 6 diantaranya karena covid-19.

Pemprov Kalimantan Barat merasa terbebani karena dari semua PMI yang bermasalah tidak semua berasal dari Kalimantan Barat namun juga berasal dari daerah lain.

Gubernur berharap BP2MI dapat menyelesaikan masalah ini sehingga dapat mengurangi beban Pemprov.

"Kita akan bahas lebih lanjut tentang anggaran BP2MI yang sangat minim dan meminta Presiden menepati janjinya terkait anggaran karena BP2MI menangani pekerjaan yang besar" ujar Alifudin, Anggota Komisi IX se usai acara.

Selain PMI, Alifudin juga



membahas persoalan syarat masuk ke Kalimantan Barat yang mewajibkan swab PCR negatif yang dirasa memberatkan sebagian masyarakat perantau.

H. Alifudin, S.E.,M.M



Temui Warga Dapilnya yang Berduka

Jakarta (25/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat I turun langsung saat mendapat kabar bahwa salah seorang warga dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihannya sedang berduka cita.

Pasalnya, istri dari Donie Ardiansyah - warga Pontianak - meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani serangkaian proses pengobatan di Rumah Sakit Kanker Nasional Dharmais, Jakarta.

"Innalillahi wa Innailihi Raajun, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhumah Mimi Syarmiati. Insya Allah Almarhumah

ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah yang telah mendahului. Kami mengunjungi langsung ke keluarga Almarhumah. Selain memberikan bantuan secara finansial, kami harap dengan kehadiran kami dapat menghibur keluarga yang ditinggalkan agar dapat mengikhhlaskan kepergian Almarhumah" Ungkap Alifudin saat bertemu dengan Suami Almarhumah, Donie Ardiansyah (25/03).

Sebelumnya, keluarga meminta bantuan kepada Alifudin untuk pelayan kesehatan dan perawatan selama di Jakarta. Pasien saat itu didiagnosa mengidap kanker rectum stadium 3 dan harus dirujuk ke RS

Kanker Dharmais Jakarta. Proses pengobatan telah berjalan selama kurang lebih 40 hari dari mulai kedatangan dan terus di pantau hingga akhirnya Allah SWT memanggil Almarhumah ke hadapan-Nya. Alifudin turun langsung untuk memastikan proses administrasi hingga pemulangan jenazah dapat berjalan dengan lancar dan memastikan tiba di Pontianak tanpa kendala.

"Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Bang Alif - panggilan akrab Alifudin - yang telah mendampingi kami dari mulai datang hingga saat istri saya dipanggil yang Maha Kuasa" tutur Donie

H. Ahmad Syaikh



Kunker ke Korem 045/ Garuda Jaya Babel

Bangka Belitung (25/03) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikh menanyakan bantuan motor Pemerintah daerah kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Hal itu disampaikan Syaikh dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Markas Resort Militer (Korem) 045/ Garuda Jaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu, (24/03).

Syaikh mengungkapkan, saat dirinya menjadi Wakil Walikota Bekasi pada 2013-2018, Pemkot membuka kebijakan untuk memberikan bantuan motor kepada Babinsa.

"Ketika jadi Wakil Walikota Bekasi, Babinsa kami berikan bantuan berupa sepeda motor," ungkap Syaikh.

Menurut Syaikh, kebijakan tersebut perlu dilakukan karena Babinsa bekerja di lapangan dengan mobilitas tinggi, sementara sarana sepeda motor masih kekurangan sekitar 181 unit.

"Bantuan ini penting. Sebab mereka ada di lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mobilitasnya tinggi sekali," jelas Syaikh.

Syaikh yang juga Presiden PKS itu melakukan Kunker Komisi I selama tiga hari, yakni 24-26 Maret di Babel. Kedatangan rombongan disambut Gubernur Babel, Erzaldi Rosman di Ruang VVIP Bandara Depati Amir, Rabu (24/03/2021).



H. Ahmad Syaikh



Berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung (Babel),

Pangkalpinang (25/03) --- Presiden PKS Ahmad Syaikh berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu, (24/3). Dalam kesempatan itu, Syaikh datang ke Tugu 0 Kilometer yang menjadi ikon baru Kota Pangkalpinang, Ibukota Babel.

Syaikh memuji kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Walikota Pangkalpinang.

"Saya apresiasi kepada Walikota Pangkalpinang yang memiliki inovasi dan kreativitas menjadikan monumen 0 kilometer yang lebih representatif. Sebelumnya titik 0 kilometer hanya ditandai dengan patok beton, alhamdulillah sekarang sudah lebih ikonik," ujar Syaikh.

Di samping itu, koin yang

dijadikan lambang di titik 0 kilometer adalah koin yang dibuat pada tahun 1820 M di Babel. Ini menunjukkan pada saat itu Babel sudah melakukan transaksi ekonomi.

"Kalau pada abad 19 saja, Bangka Belitung sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, seharusnya ini bisa terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih maju."

Koin ini juga melambangkan persatuan di Babel. Satu sisi koin bertuliskan Arab, dan satu sisi lainnya bertuliskan Cina. Etnis, bagi warga Babel bukan menjadi masalah.

"Tong ngin fan ngin jit jong" yang artinya Cina dan Melayu, sama



saja," kata Syaikh mengutip pernyataan Walikota Pangkalpinang.

Persatuan antar etnis membuat kondisi keamanan terjaga.

"Ini sangat kondusif untuk kemajuan perekonomian daerah," ujar Syaikh.

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si



Kajian Tarhib Ramadhan DPW PKS Bali

Badung -- Netty Prasetyani Anggota DPR RI Fraksi PKS menyempatkan diri bertemu dengan struktur usai mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI ke Bali, Ahad (28/03/2021).

Netty yang didampingi oleh suami, Ahmad Heryawan menjadi pengisi di kajian Tarhib Ramadhan DPW PKS Provinsi Bali.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A



Sosdapil di Depok

Depok – Anggota MPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam Agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI atau dikenal dengan Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) pada Selasa (23/3) di Rumah Peduli Nurul Fikri, Tugu, Cimanggis - Depok, Nur Azizah ajak masyarakat senantiasa mengamalkan serta merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila merupakan dasar bernegara bagi seluruh umat beragama di Indonesia, serta kunci terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

"Empat pilar Negeri ini yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan kesatuan

utuh dalam menciptakan kerukunan dan persatuan. Dalam Pancasila mengandung lima unsur pembangun keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, bernegara dan beragama. Tentunya dasar ini harus terus dipahamkan dalam setiap generasi Rakyat Indonesia", jelas Nur Azizah.

la menambahkan, jangan sampai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, kehilangan akar dalam bernegara. Sehingga pengamalan Pancasila ini merupakan hal yang wajib ada di setiap generasi. Pasalnya, tidak sedikit generasi muda saat ini semakin terkikis jiwa nasionalismenya, bahkan ada yang sampai belum hapal Pancasila.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A



Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Bekasi

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. ajak warga kota Bekasi tingkatkan target ibadah harian bersama keluarga dan jadikan bulan Ramadhan tahun ini sebagai sarana perekat kebersamaan. Hal itu disampaikan Nur Azizah pada Sabtu (27/3), dalam agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di kediaman H. Ahmad Segaf, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Menurutnya, seorang kepala keluarga memiliki peranan penting dalam peningkatan kapasitas ibadah khususnya di bulan Ramadhan. “Seorang ayah atau kepala keluarga

adalah komandan yang bertugas membuat lingkungan dan aturan serta membimbing keluarga. Untuk para kepala keluarga mulai hari ini jelang Ramadhan sudah harus mulai mengajak keluarganya memperbanyak ibadah sunnah, agar saat menjalani ibadah dan berbagai aktivitas selama Ramadhan tidak terasa berat”, jelas Nur Azizah.

Sebagai salah satu anggota Komisi VIII DPR RI, Nur Azizah menjelaskan akan pentingnya pengokohan ketahanan keluarga. Pendidikan keluarga penting untuk membentuk kepribadian anggota keluarga,



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A



Himbau Walikota Depok Tertibkan Pengamen Ondel-Ondel dan Silver Boy



Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., himbau Walikota Depok segera koordinasi Dinas Sosial, DPAPMK, serta Satpol PP untuk menertibkan pengamen ondel-ondel dan Silver Boy di Kota Depok. Pasalnya, selain membahayakan para pengguna jalan raya, karena banyaknya pengamen berlalu lalang di jalan raya, juga untuk memberantas berbagai bentuk eksploitasi anak dan remaja, karena para pengamen ini di dominasi oleh anak-anak dan remaja.

Saat ditemui dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Selasa (23/3) di Rumah Peduli Nurul Fikri, Tugu, Cimanggis – Depok, Nur

Azizah menyebutkan harus segera ada penertiban, karena itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dan remaja. Jika terus dibiarkan akan mengancam masa depan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja Kota Depok.

“Permasalahan yang sangat saya soroti khususnya di Depok saat ini, banyak sekali anak-anak jalanan yang kemudian di eksploitasi menjadi pengamen ondel-ondel, kemudian mengecat tubuhnya dengan warna silver (silver boy) dan meminta-minta di jalan-jalan dan di lampu merah. Ada masyarakat yang melapor pada saya, anak-anak itu justru dimanfaatkan oleh oknum yang menyewakan kostum ondel-

ondel, mereka mengambil keuntungan dengan menyewakan ondel-ondel kepada anak-anak untuk mengamen”, ungkap Nur Azizah.

Sementara itu Umar Abdul Azis, warga Jatijajar, Tapos, Depok, menyebutkan bahwa, masalah pengamen Ondel-ondel khususnya di Kelurahan Jatijajar itu banyak sekali, dan kebanyakan itu dibawah umur, “anak-anak umur SD banyak sekali. Dan parahnya memang ada penampungnya. Mereka berasal . Harus segera ada upaya untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.dari Bogor, Bekasi dan Jakarta

H. Rofik Hananto, S.E



Kunnspek Komisi VII DPR RI ke Pabrik Narogong-PT SBI Tbk

Bogor (26/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mendukung pengolahan sampah menjadi salah satu bahan bakar alternatif, seperti yang sudah dilakukan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk.

Menurut Rofik, PT SBI Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang telah memanfaatkan sampah perkotaan (municipal solid waste/MSW) sebagai bahan bakar alternatif dalam pembuatan semen lewat fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu refused derived fuel (TPS RDF).

RDF, imbuhnya, merupakan hasil dari sampah domestik yang diolah dengan metode biodrying untuk dijadikan energi terbarukan

dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Pemanfaatan sampah tersebut mampu mensubstitusi penggunaan batu bara menjadi bahan bakar hingga 3% substitusi energi panas (thermal substitution rate/TSR)

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT SBI ini dan berharap apa yang sudah dilakukan dapat dikembangkan lebih luas, sehingga permasalahan sampah yang ada saat ini dapat kita selesaikan," kata Rofik

Rofik mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VII DPR RI ke Pabrik Narogong-PT SBI Tbk Citeureup Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/03/2021).

"Saat ini permasalahan sampah menjadi perhatian semua pihak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, total volume sampah yang diproduksi menjadi lebih dari 67 juta ton per tahun, dan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan populasi dan ekonomi," urainya.

Legislator asal Kabupaten Purbalingga itu menambahkan, tentu pengolahan sampah menjadi RDF (Refused Derived Fuel) dapat menjadi salah satu solusi alternatif dan bisa menjadi sumber bahan bakar baik untuk pabrik semen ataupun industri yang lainnya (PLTU).

Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Kunker Komisi VII DPR RI ke PLTGU JAWA-1

Karawang (25/3) — Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, DR.H. Mulyanto, M.Eng. mengunjungi PLTGU Jawa-1 di Karawang, 25 Maret 2021. Pembangkit berbahan bakar gas 2 x 850 MW ini masuk dalam program 35 ribu MW. Ditargetkan COD Desember 2021 ini.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Kungker Pertamina Tanjung Gerem

Banten (4/4) - Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, DR.H. Mulyanto, M.Eng. anggota Fraksi PKS mengunjungi Storage BBM Pertamina Tanjung Gerem di Merak, Banten, 1 April 2021. Storage ini

untuk melayani BBM se-Banten dengan rata-rata pasokan 300 ribu kilo liter per hari.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Pelantikan DPC PKS Pamulang

Tangsel (25/3) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dr.H.Mulyanto, M.Eng hadir dan memberi sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPC PKS Pamulang, Tangsel, Banten. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD PKS Tangsel dan Anggota DPRD Tangsel. Bapak Tribudi dilantik menjadi Ketua DPC Pamulang. (27/3/2021).



Hj. Nevi Zuairina



Serahkan Ambulance pada Empat Yayasan di Sumbar

Pasaman Barat (28/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina pada aktivitas kinerja di daerah pemilihannya, turut mendampingi proses penyerahan bantuan Ambulan kepada empat yayasan di Wilayah Sumatera Barat.

Yayasan tersebut antara lain, Yayasan Al Kahfi Pasaman barat, yayasan Rabbaniyyun Padang Pariaman, yayasan Al Madani lubuk Sikaping dan yayasan Auladi 50 kota.

Legislator Sumbar ini pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atas penyerahan bantuan ambulan ini. Karena sebuah pandangan sangat positif anggota DPR RI turut serta

turun ke masyarakat dengan membawa aura yang positif demi kemajuan daerah.

"Saya berterima kasih kepada PT Bukit Asam yang telah menyalurkan beberapa Ambulan ke Wilayah Sumatera Barat. Semoga upaya ini dapat menolong dan memberi kemudahan dalam urusan bapak ibu masyarakat semuanya. Setiap orang pasti ingin sehat wal'afiat dan lancar segala urusan. Namun ada saatnya kita tidak mampu menghindari sakit dan musibah. Ketika itu terjadi, maka dengan tolong menolong lah kita dapat kuat dan mampu menghadapinya", kata Nevi dalam sambutannya.

Politisi PKS ini tidak lupa menyampaikan, kepada masyarakat penerima bantuan ambulan agar saling mendo'akan dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Khusus permintaan doa kepadanya agar bisa lebih maksimal membersamai masyarakat. Ia juga sangat mengharapkan agar menghindari keadaan berjarak dengan masyarakat. Yayasan yang memiliki fasilitas di harapkan dapat memberikan pelayanan dan membantu masyarakat semampunya.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si.



Resmikan BLK di Lombok

Lombok (29/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti bersama Kementerian Tenaga Kerja menggandeng LAZ Dasi NTB meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) jurusan teknik informatika di Lombok, NTB, Sabtu (29/03/2021) secara daring.

Mufida bersyukur BLK Jurusan Teknik Informatika lengkap dengan infrastruktur gedung, ruangan kelas, komputer dengan spesifikasi program teknik informatika dan sarana prasarana selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Mufida menekankan, BLK di Lombok adalah yang ketiga yang diresmikan bersama Kementerian Tenaga Kerja. Ia menyebut pihaknya

fokus pada Kita fokus pada pembangunan BLK di daerah-daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Sebelumnya sudah kita resmikan di Madiun, Ngawi dan sekarang di Lombok. Kita berharap dengan adanya BLK ini bisa melatih anak-anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun purna PMI yang kembali dari bekerja sehingga bisa menambah keterampilan di dunia digital," tutur Mufida.

Anggota DPR RI yang giat mendampingi PMI ini menekankan, sebagai keterampilan yang sangat dibutuhkan hari ini, kemampuan digital wajib dimiliki agar anak-anak muda calon pekerja agar memiliki



daya saing dan bisa berdaya di negeri sendiri.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi dan Daerah serta mitra yang alhamdulillah amanah sehingga mewujudkan Gedung BLK dengan sarana dan prasarananya," katanya.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur

Surabaya (03/04) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti ketimpangan (in equality) dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (01/04/2021).

Kunjungan kerja spesifik dilakukan dalam rangka Sosialisasi UU CIPTA KERJA dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank Indonesia.

Hadir dalam acara ini Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisiner OJK, Wakil Gubernur Jawa Timur, BPS, Bulog, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menanggapi paparan dari BI, OJK, BPS dan Himbara, Anis Byarwati

yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan tentang masalah ketimpangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Anis menyoroti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, dimana angka pengangguran sangat tinggi. Dan tingginya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 ini didominasi oleh masyarakat miskin yang jumlahnya 54%, sedangkan masyarakat menengah jumlah penganggurannya 39%, dan masyarakat kaya jumlahnya 7%.

Data ini dengan jelas menegaskan bahwa pengangguran di Indonesia separuhnya adalah



masyarakat miskin.

Menurut Anis, hal ini menuntut program-program yang dicanangkan pemerintah seharusnya menasar masyarakat miskin.

Hari Aspirasi



Fraksi PKS Terima Aspirasi TP3 Enam Laskar FPI

Jakarta (30/03) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris Fraksi Leadia Hanifa Amalia, Wakil Ketua Fraksi Adang Daradjatun, Netty Prasetyani, dan Suryadi, menerima audiensi delegasi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI. Dalam audiensi ini TP3 dipimpin oleh Abdulloh Hehamahua dan Marwan Batubara.

Dalam pernyataannya, TP3 menilai dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat dalam kasus wafatnya 6 Laskar FPI di tangan aparat. Untuk itu, TP3 meminta agar pengadilan HAM berat ditegakkan berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tewasnya 6 Laskar FPI

memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 9 UU 26 Tahun 2000.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan merasa terhormat dengan kehadiran TP3 yang disebutnya sebagai pejuang keadilan di negeri ini. Dan, Fraksi PKS yang berkomitmen akan terus memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia, bukan hanya dalam kasus enam Laskar FPI tapi juga seluruh kasus ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

"Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara.

Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TP3 yang benar-benar serius menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti dan memperjuangkan keadilan di negeri ini terutama dalam kasus wafatnya 6 Anggota Laskar FPI. Data-data yang disampaikan menjadi amunisi yang kuat bagi Fraksi PKS untuk menyuarakan aspirasi tersebut di parlemen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M



Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Dari IPDN

Jakarta (31/3) - Anggota DPR RI Junaidi Auly resmi mendapatkan gelar doktor bidang ilmu pemerintahan setelah lulus dalam sidang promosi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) hari ini.

Junaidi berhasil mendapatkan doktor setelah memaparkan hasil penelitian disertasi yang berjudul "Implementasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dalam Pengawasan Keuangan Negara" dalam sidang yang diuji oleh Dr. Hadi Prabowo,MM, Prof. Dr. Khasan Effendy,Mpd, Prof. Dr. Ngadisah, MA, Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA, Prof. Dr. Andriansyah,M.Si, Dr. Sampara Lukman, MA, Dr. Ali Hanafiah Muhi, MP, dan Dr. Zainudin Amali,M.Si



KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI MASA PERSIDANGAN IV/TAHUN SIDANG 2020-2021 KE PROVINSI LAMPUNG



Pantau Kondisi Ekonomi Lampung Selatan

Lampung Selatan (02/04) --- Menjelang bulan Ramadhan, Anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, (01/04/2021).

Ketua Tim Kunker dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan, tujuan dari kunker tersebut adalah untuk menjalankan tugas konstitusional DPR RI.

"Tujuan kunker ini yaitu untuk melihat kondisi perekonomian daerah menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi menyampaikan, tren setiap

menjelang puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri terkait permintaan ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta kebutuhan dana tunai oleh masyarakat terus meningkat dari hari biasanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan kunker spesifik tersebut, pihaknya berharap memperoleh gambaran terkait kesiapan Pemkab Lampung Selatan, BI, BPS, dan pihak perbankan dalam menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Kami ingin mengetahui langkah-langkah efektif apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Lampung Selatan dalam mengakomodir ketersediaan distribusi dan penetapan harga dari

semua kebutuhan bahan pokok menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini mengaku senang melihat keberpihakan pemerintah dan perbankan dalam rangka membina UMKM dengan memberikan partisipasi penuh dalam upaya mengembalikan perekonomian di Lamsel. Untuk itu, ia berharap dengan adanya keseriusan ini, masyarakat Lamsel dapat merasakan kembali kesejahteraannya seperti di masa sebelum pandemi.

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen



Kunjungi
**KANAL RESMI
FRAKSI PKS DPR RI**

fraksi.pks.id



Website

fraksi.pks.id



Instagram

[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter

[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook

[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)



Youtube

[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV)